

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas yakni sekitar 5.176.800 km² dengan panjang garis pantai 81.290 km. Hal ini menunjukkan bahwa luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya, sehingga tidak mengherankan jika Indonesia memiliki potensi sumber daya pesisir dan lautan yang sangat besar.

Indonesia dengan potensi kelautan yang sangat besar seyogyanya harus bisa dimanfaatkan. Kekayaan sumber daya alam laut seharusnya dapat diolah untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis seperti produksi garam. Namun pada kenyataannya untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri saja Indonesia masih harus mengimpor dari India dan Australia. Data Kementerian Perdagangan mencatat, bahwa impor garam pada 2007 mencapai 1,8 juta ton, dengan perincian untuk garam industri 1,6 juta ton dan garam beryodium (garam konsumsi) 200.000 ton. Selanjutnya pada 2008 impor garam Indonesia sebanyak 1,78 juta ton, dengan perincian 1,58 juta ton garam industri dan 200.000 ton garam beryodium. Lalu pada 2009 volume impor garam tercatat hanya 1,57 juta ton, dengan perincian garam industri 1,4 juta ton dan garam konsumsi 117.000 ton (<http://www.KabarBisnis.com>).

Kualitas garam yang dikelola secara tradisional pada umumnya harus diolah kembali agar layak dijadikan garam konsumsi maupun untuk garam industri. Pembuatan garam dilakukan dengan beberapa kategori berdasarkan perbedaan kandungan NaCl sebagai unsur utama garam. Jenis garam dapat dibagi dalam beberapa kategori seperti; kategori baik sekali, baik dan sedang. Dikatakan berkisar baik sekali jika mengandung kadar NaCl diatas 95 persen, kategori baik dengan kadar NaCl 90–95 persen, dan kategori sedang dengan kadar NaCl antara 80–90 persen. Di Indonesia, kebutuhan kadar garam diatas 95 persen yang mencapai 1,2 juta ton seluruhnya masih diimpor. Sistem pegaraman rakyat sampai saat ini masih menggunakan kristalisasi total sehingga produktifitas dan kualitasnya masih kurang. Pada umumnya garam dengan proses tradisional memiliki kadar NaCl kurang dari 90 persen dan banyak mengandung pengotor.

Produksi garam nasional saat ini dilakukan oleh pegaraman rakyat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT. Garam. Luas area yang dikelola oleh PT. Garam seluas 5.116 Ha dan seluruhnya berada di Pulau Madura dengan kapasitas produksi 60 ton/Ha/tahun. Sementara luas area pegaraman 25.542 Ha dikelola secara tradisional oleh rakyat dan hanya memproduksi 40 ton/Ha/tahun.

Tabel 1. Luas Lahan pegaraman rakyat di Indonesia

Lokasi	Luas (ha)
Jawa Barat	1.159
Jawa Tengah	2.168
Jawa Timur	6.904
Sumenep	10.067
Pamekasan	3.075
Sampang	2.205
NTB	1.155
Sulsel	2.040
Sumatera dll	1.885
Total	25.542

Sumber: PT. Garam Persero, (Data diolah, 2000).

Berdasarkan tabel di atas, Pulau Madura mempunyai lahan pegaraman rakyat yang paling luas yakni sebesar 15.347 Ha, Kabupaten Sumenep dengan luas areal 10.067 Ha, Pamekasan dengan lahan seluas 3.075 Ha, sementara Sampang hanya dengan lahan seluas 2.205 Ha. Dari data ini pula dapat ditarik kesimpulan bahwa komoditas garam masih menjadi komoditas pangan yang banyak dijadikan sebagai mata pencaharian oleh masyarakat Madura.

Pulau Madura merupakan pulau yang sudah jamak disebut Pulau garam, hal ini karena memang Pulau Madura merupakan salah satu daerah penghasil garam terbesar di Indonesia. Pulau ini terletak di timur laut Jawa kurang lebih 7° sebelah selatan dari khatulistiwa diantara 112° dan 114° bujur timur. Luas Pulau Madura 4.887 Km². Panjangnya kurang lebih 190 Km dan jarak yang terlebar 40 Km. Pantai utara merupakan suatu garis panjang yang hampir lurus. Pantai selatannya di bagian timur mempunyai dua teluk yang besar terlindung oleh pulau-pulau, gundukan pasir dan batu-batu karang. Batas-batas administrasi Pulau Madura adalah:

- a. Batas sebelah utara: Laut Jawa
- b. Batas sebelah selatan: Selat Madura

- c. Batas sebelah timur: Laut Jawa
- d. Batas sebelah barat: Selat Madura

Mempunyai luas lahan pegaraman rakyat paling luas tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petaninya, petani garam di Madura masih berkutut dengan kemiskinan padahal kalau dilihat dari pentingnya garam, garam merupakan bahan pangan utama yang tiap hari dibutuhkan oleh masyarakat, baik kalangan bawah, menengah ataupun kalangan atas, lantas kenapa nasib kehidupan petaninya masih jauh dari kata layak, fenomena ini akan melahirkan banyak pertanyaan: Apakah ada yang salah dengan sistem produksinya, permodalannya, atau kebijakan pemerintah yang sama sekali tidak populis dalam hal garam?

Salah satu sentra produksi garam di Madura adalah di Kabupaten Pamekasan, yang secara demografis memiliki jumlah penduduk 835.101 jiwa dengan kepadatan penduduk per Km² cukup bervariasi. Secara Administratif Kabupaten Pamekasan terdiri dari 13 kecamatan dan 189 desa/kelurahan. Beberapa kawasan di Kabupaten Pamekasan yang menjadi tempat produksi garam adalah Kecamatan Tlanakan, Galis dan Pademawu.

Pamekasan merupakan salah satu sentra penghasil garam nasional. Usaha pertambangan garam di daerah ini lebih banyak dikerjakan oleh penggarap. Jumlah petani garam Pamekasan diperkirakan sekitar 1.200 orang dengan 90 persen adalah petani penggarap. 10 persennya adalah petani pemilik lahan (<http://www.waspada Online.com>). Melihat komposisi data diatas, sudah selayaknya pegaram penggarap mendapat perhatian lebih dari pemerintah, utamanya dalam kaitannya dengan interaksi sosial pegaram penggarap dengan pemilik modal.

Kecamatan Galis merupakan sentra produksi garam Pamekasan, selain pegaraman rakyat di kecamatan ini juga ada PT. Garam (Persero). Usaha pegaraman rakyat terkonsentrasi di 4 desa yaitu: Lembung, Polagan, Pandan dan Konang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian tentang pola hubungan produksi dan modal sosial pada usaha pegaraman rakyat di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola hubungan produksi antara pegaram penggarap dengan pemilik modal pada usaha pegaraman rakyat di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana modal sosial pada usaha pegaraman rakyat di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana kesejahteraan pegaram penggarap di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pola hubungan produksi antara pegaram penggarap dengan pemilik modal pada usaha pegaraman rakyat di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Mengetahui modal sosial pada usaha pegaraman rakyat di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?
3. Mengetahui kesejahteraan pegaram penggarap di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.